

Mengungkap Penghidupan Petani Miskin Pedesaan; Sebuah Kajian Sosial Ekonomi Jurnal EcceS

**Andi Faisal Anwar¹
Nursini²**

¹Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. Yasin Limpo, No. 36 Samata, Gowa Sulawesi Selatan

²Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea
E-mail :faisal.anwar@uin-alauddin.ac.id¹, nini_mahmud@yahoo.com²

Abstrak: Mengungkap Penghidupan Petani Miskin Pedesaan; Sebuah Kajian Sosial Ekonomi

Struktur perekonomian Kabupaten Bulukumba yang ditopang dari sektor pertanian, nampaknya belum maksimal berkontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Bulukumba, yang meliputi aspek sosial ekonomi, seperti rendahnya tingkat pendapatan, minimnya akses pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan rendahnya aksesibilitas menyampaikan pendapat serta minimnya akses informasi bantuan sosial. Kantong-kantong kemiskinan yang ada di wilayah ini, justru tersentralisir pada daerah sentrum produksi pertanian terbesar di Kabupaten Bulukumba, yaitu Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kajang. Kontradiksi sosial tersebut, pada akhirnya menempatkan kemiskinan di daerah tersebut cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi yang ada, sebagai strategi pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan di di Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang dan Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan model teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penyebab utama rendahnya akses pangan bergizi, sanitasi, dan listrik adalah rendahnya pendapatan yang dimiliki. 2). Petani yang menggarap luas lahan di bawah dari 100 are, maka rata-rata pendapatannya di bawah dari garis kemiskinan Bulukumba atau dipastikan miskin. 3). Komoditi ubi kayu dan padi sawah merupakan sektor basis yang mampu menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, dengan penguatan inovasi home industri, sistem mekanisme resi gudang dan penguatan industri olahan berbasis komoditi unggulan. 4). Penanganan pengentasan kemiskinan yang efektif dan efisien dapat lebih konsolidatif, dengan pembuatan UPTD pengentasan kemiskinan, sehingga program pengentasan kemiskinan bersinergi dengan baik, tidak tumpang tindih dan lebih transparan.

Kata Kunci: Kemiskinan, Sosialekonomi, Komoditi Unggulan

Abstract: Revealing The Livelihood of The Poor Farmer; A Social

Economic Review

The economic structure of Bulukumba Regency, supported by the agricultural sector, does not seem to have the maximum contribution to poverty alleviation. Poverty in Bulukumba, covering socio-economic aspects, such as low income levels, lack of access to food, clothing, housing, education, health and low accessibility of opinions and lack of access to social assistance information. The pockets of poverty that exist in this region, it is centralized at the largest agricultural production center in Kab.Bulukumba, the District Gantarang and District Kajang. Such social contradictions, in turn, put the poverty in the area high enough. This study aims to determine the existing socio-economic conditions as existing poverty alleviation strategies in Bulukumba. The research was conducted in Bonto Baji Village, Kajang Sub-district and Bonto Macinna Village, Gantarang Sub-District, Bulukumba District. This research uses descriptive qualitative method, with triangulation technique model. The results showed that: 1). The main cause of low access to nutritious food, sanitation, and electricity is low income. 2). Farmers working on a land area under 100 acres, then the average income is below the poverty line of Bulukumba or ascertained poor. 3). Cassava cassava and wetland rice are the basic sectors that can absorb labor and reduce poverty, with the strengthening of home industry innovation, warehouse receipt mechanism system and strengthening of commodity based commodity based industry. 4). The effective and efficient handling of poverty reduction can be more consolidative, with UPTD poverty alleviation making, so that poverty alleviation programs are synergistic, non-overlapping and more transparent.

Keywords: Poverty, Socio-Economic, Premium Commodity.

PENDAHULUAN / INTRODUCTION

Roda perekonomian Kabupaten Bulukumba sebagian besar digerakkan oleh sektor pertanian, namun kontribusi sektor tersebut belum mampu mereduksi angka kemiskinan daerah ini, yang meliputi aspek sosial ekonomi, seperti rendahnya tingkat pendapatan, minimnya akses pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan rendahnya aksesibilitas menyampaikan pendapat serta minimnya akses informasi bantuan sosial. Kantong-kantong kemiskinan yang ada di wilayah ini, justru tersentralisir pada daerah sentrum produksi pertanian terbesar di Kabupaten Bulukumba, yaitu Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kajang. Kontradiksi sosial tersebut, pada akhirnya menempatkan kemiskinan di daerah tersebut cukup tinggi. Padahal, membaiknya sektor pertanian telah mengantarkan daerah ini mampu memaksimalkan penerimaannya, serta menjadi kontributor utama terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Bulukumba. Dalam tujuh tahun terakhir 2010-2016, dominasi sektor pertanian tetap yang terbesar dengan tren yang cukup fluktuatif dalam mengakselerasi peningkatan PDRB di Kabupaten Bulukumba. Di tahun 2011 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bulukumba hanya mencapai 44,8 persen dan

meningkat menjadi 45,13 persen di tahun 2014 dan turun menjadi 41,14 persen di tahun 2016, yang merupakan capaian terendah dalam 7 tahun terakhir di Kabupaten Bulukumba (Bulukumba Dalam Angka, 2017).

Pentingnya sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba juga dapat dilihat dari perannya terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan struktur serapan tenaga kerja menurut sektor di Kabupaten Bulukumba, kontribusi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 47,46 persen, yang mendominasi sektor-sektor lainnya. Selanjutnya, disusul oleh sektor perdagangan dengan serapan tenaga kerja sebesar 18,41 persen. Sektor yang paling terkecil menyerap tenaga kerja adalah industri pengolahan. Porsi besaran penyerapan tenaga kerja ini mengkonfirmasi bahwa sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba, memiliki pengaruh yang besar terhadap penghidupan masyarakat Kabupaten Bulukumba secara keseluruhan.

Meskipun sektor perdagangan tidak seantusias sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja, namun sektor ini menjadi sektor alternatif terbesar kedua bagi masyarakat Kabupaten Bulukumba dalam pemenuhan kebutuhan kerjanya. Sedangkan sektor industri, merupakan sektor tidak terlalu berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang ada. Dengan kata lain, sektor ini tidak cukup representatif mengakselerasi peningkatan serapan tenaga kerja yang ada. Terkait dengan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bulukumba, hal yang paling mendasar dalam pendekatan keekonomian suatu daerah adalah sejauh mana daerah tersebut mampu mengatasi kemiskinan yang ada. Berbagai indikator ditetapkan untuk menafsirkan kemiskinan agar tidak menjadi bias. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan kebutuhan dasar atau konsumsi keluarga untuk kemiskinan dan dikonversikan ke dalam rupiah atau garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonversikan ukuran kemiskinan ke dalam 2.100 kalori per kapita per hari ditambah kekurangan pakaian, rumah tinggal, kesehatan, pendidikan, bahan bakar dan keperluan transportasi. Sedangkan, Bank Dunia menetapkan ukuran kemiskinan melalui ukuran dollar yaitu USD 1,9 per orang perhari, di mana bila suatu individu hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kurang dari tiga dollar per hari, maka dapat dikatakan individu tersebut tergolong miskin.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba dalam satu dekade terakhir memperlihatkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2005-2014 menurun sebanyak 3,71 persen. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba berkurang

sebanyak 13.310 orang dalam sepuluh tahun terakhir. Setidaknya ini dapat menjadi starting point yang baik, untuk memerangi angka kemiskinan yang ada. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2014 mencapai 34.190 orang (Bulukumba Dalam Angka, 2015). Jika angka kemiskinan tersebut dilihat lebih dalam berdasarkan kecamatan, dari 10 kecamatan yang ada. Angka kemiskinan tertinggi terdapat di Kecamatan Bulukumpa (6.309 orang), disusul Kecamatan Kajang (6.109 orang) dan ketiga adalah Kecamatan Gantarang (6.009 orang). Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terendah berada di Kecamatan Bontobahari 2.189 orang (Bulukumba Dalam Angka, 2015). Tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Bulukumpa, Kajang dan Gantarang cukup signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan di Kabupaten Bulukumba. Premisnya, dengan mengatasi kemiskinan daerah tersebut maka sebagian besar masalah kemiskinan di Kabupaten Bulukumba dapat terselesaikan.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bulukumba, maka rata-rata tingkat pendidikan yang ditamatkan tertinggi adalah tamat SD sebanyak 47.487 orang dan tingkat pendidikan yang ditamatkan terendah adalah D1/II/III sebesar 4.089 orang. Dengan kata lain, tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bulukumba secara rata-rata didominasi penduduk yang tamat SD dari total jumlah penduduk yang ada. Dan komposisi penduduk tamat SD itulah yang banyak bekerja di sektor pertanian.

Dalam sepuluh tahun terakhir tepatnya 2005-2014, terdapat tiga komoditi pertanian yang paling produktif menghasilkan hasil produksi yang tinggi di tingkatan petani. Pertama, ubi kayu yang mencapai rata-rata produktivitas sebesar 145,1 kw/ha (BPS Kabupaten Bulukumba, berbagai tahun). Jika dilihat berdasarkan kecamatan, daerah yang paling banyak menghasilkan komoditi tersebut adalah Kecamatan Kajang dengan jumlah produksi 7.182 ton dengan luas lahan terluas diantara kecamatan lainnya yakni 482 ha dan rata-rata produktivitas mencapai 149 (kw/ha). Kedua, ubi jalar 124,6 (kw/ha). Sementara kecamatan yang paling produktif menghasilkan komoditi ubi jalar adalah Kecamatan Gantarang sebesar 121 (kw/ha). Ketiga, padi sawah memiliki nilai rata-rata produksi hingga 54,6 (kw/ha). Untuk kategori padi sawah, Kecamatan Gantarang merupakan daerah yang paling produktif menghasilkan padi di Kabupaten Bulukumba dengan capaian rata-rata produktivitas sebesar 64 (kw/ha). Menariknya kedua kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kajang dan Kecamatan Gantarang juga merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, penting untuk dicermati dan dikaji lebih jauh bagaimana pengembangan ekonomi berbasis komoditi unggulan dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bulukumba.

TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

Kemiskinan

Menurut Adam Smith dalam Skousen (2005) dan Deliarnov, (2010) bahwa untuk mencapai tingkat kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan, maka produksi dan perdagangan mesti berjalan maksimal dan menghasilkan kekayaan universal, Smith menganjurkan pemerintah memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas, baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional. Dalam bukunya *The Wealth of Nations*, Smith juga mendukung prinsip "kebebasan alamiah", yakni setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya, tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini mengandung pengertian negara tidak boleh campur tangan dalam perpindahan dan perputaran aliran modal, uang, barang, dan tenaga kerja. Adam Smith juga sependapat bahwa pada dasarnya tindak laku manusia berasal pada kepentingan sendiri (*self-interest*), bukan belas kasian ataupun perikemanusiaan, untuk menjadi sejahtera dan keluar dari jerat kemiskinan. Dalam artian perdagangan tanpa batas adalah jalan keluar bagi setiap penduduk berpendapatan rendah, untuk menjadi lebih sejahtera sehingga tidak hidup dalam jerat kemiskinan. Konsep ukuran kemiskinan yang dikemukakan oleh para ahli, lebih dilekatkan pada aspek pendapatan perkapita. Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari USD 1,9 per hari atau sekitar Rp. 13.600 sekitar Rp. 775 ribu rupiah per bulan, masuk dalam kategori miskin.

Namun, pandangan itu ditentang oleh Karl Marx dalam Wood, (2002), Macarov, (2003), Bernstein, (2010) dan Habibi, (2018) bahwa kemiskinan disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya lebih struktural. Macarov membagi pendapat ini kedalam beberapa hal, dimana diantaranya berkaitan dengan kelompok-kelompok minoritas sebagai pihak yang paling rentan dan banyak berada dalam kemiskinan. Dalam hal ini, kemiskinan yang terjadi pada kelompok minoritas diakibatkan diskriminasi yang seringkali menimpa penduduk miskin. Kelompok-kelompok minoritas seringkali mendapatkan diskriminasi dalam berbagai hal, termasuk dalam hal ekonomi. Hal ini yang menyebabkan banyak kelompok minoritas hidup dalam kondisi miskin. Mereka yang hidup dalam kemiskinan, sebagai akibat dihambatnya akses mereka terhadap ekonomi. Macarov menyebutkan bahwa penyebab kemiskinan secara struktural tidak lain tentunya ialah sistem ekonomi kapitalisme laissez

faire, sebagaimana yang dianjurkan oleh Adam Smith. Dimana, sekelompok kecil orang berkuasa sepenuhnya atas akses dan berbagai aset ekonomi dibandingkan dengan sebagian besar lainnya.

Kapitalisme sebagai suatu sistem sosial yang spesifik, berbeda dengan sistem sosial lainnya. Berbeda dengan persepsi umum, kapitalisme bukan sekadar sistem sosial yang mengacu pada perburuan keuntungan. Kata kunci yang krusial bagi sistem kapitalisme ialah 'komodifikasi' akibat meluasnya produksi komoditas barang dan jasa (generalized commodity production). Ini adalah proses dimana produksi barang dan jasa serta reproduksi sosial (manusia/pekerja), diciptakan untuk dan melalui pertukaran pasar yang sekaligus tunduk pada disiplin dan paksaan nilai-nilai pasar. Semua barang dan termasuk manusia dilihat sebagai komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar, untuk diperjual-belikan. Pekerja tidak bisa bertahan hidup tanpa menjual tenaganya di pasar kerja. Hal yang sama berlaku untuk kapitalis (pemilik modal), yang menggantungkan produksinya pada input dari pasar dan menjualnya kembali ke pasar. Perilaku baik pekerja dan kapitalis dikondisikan oleh nilai-nilai pasar yang utama: kompetisi, inovasi, produktivitas, profit dan akumulasi.

Sebagai sistem sosial yang unik, kapitalisme lahir dari kondisi sejarah yang spesifik dalam ruang dan waktu tertentu. Proses komodifikasi dapat dilacak kembali ke awal industrialisasi di Inggris yang menjadi tonggak pertama dalam sejarah umat manusia meraih puncak kesejahteraan ekonominya. Jika proses awal komodifikasi ini berlangsung di sektor pertanian. Pada mulanya, proses akumulasi primitif yang disebut Marx memisahkan produsen pertanian ('petani') dari alat-alat produksinya, khususnya tanah. Hal ini menandai titik tolak hubungan kepemilikan kapitalis, dari akses kepada sarana produksi yang semula bersifat publik dan relatif inklusif, diubah menjadi bercorak pribadi dan eksklusif atas kepemilikan tanah. Pemisahan ini menghilangkan akses langsung (bukan pasar) produsen ('petani') ke tanah dan untuk selanjutnya akses mereka terhadap alat-alat produksi itu, mesti diperantarai oleh pasar.

Hasilnya, mereka tidak punya pilihan selain menanggapi pasar yang sedang bersaing satu sama lain, se-efektif mungkin dengan memangkas ongkos (produksi), dan dengan demikian melakukan spesialisasi, mengejar surplus, dan berinovasi. Dalam proses selanjutnya, ekstensifikasi dan intensifikasi hubungan komoditas (tanah dan tenaga kerja) melalui pasar mengubah cara apropriasi surplus, dari sarana ekstra-ekonomi menjadi sarana ekonomi yang lebih murni (pasar). Petani tidak lagi diekstraksi melalui pajak dan tugas tradisional lainnya, namun mereka menjadi petani (penyewa) yang diekstraksi melalui sarana ekonomi (sewa tetap). Baik petani penyewa dan tuan tanah, sekarang dipaksa untuk

melayani logika pasar dengan meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan tingginya angka kemiskinan.

Papilaya (2006) mencoba mengelaborasi kemiskinan lebih lanjut, bahwa kemiskinan merupakan suatu hal yang multidimensional, artinya kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari sisi ekonomi saja, tapi juga mesti dilihat dari segi sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan sebaiknya, tidak dilihat seperti dengan perspektif kaca mata kuda. Dimana, kemiskinan tidak dapat dilihat dari sisi ekonomi semata. Namun, mesti dilihat secara makro dan inklusif. Definisi kemiskinan ini semakin berkembang sesuai dengan penyebabnya. Dikemukakan bahwa pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan tetapi mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Akhirnya pandangan-pandangan itu disintesa oleh Amartya Sen (1999) kemiskinan lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup sebagai akibat ketiadaan akses terhadap sumber daya strategis, baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. Keterbatasan terhadap akses menciptakan kemiskinan itu sendiri. Stiglitz (2000) yang menyebutkan bahwa ada empat sumber pokok kegagalan pemerintah dalam menciptakan perbaikan akses publik sehingga dapat memicu terjadinya kemiskinan yaitu, keterbatasan informasi, keterbatasan kendali atas respon pasar, keterbatasan kendali atas birokrasi, dan keterbatasan karena proses politik. Sejalan dengan temuan Handayani, (2006) bahwa kondisi kemiskinan yang dihadapi masyarakat miskin bersifat multidimensional yaitu: (i) kesempatan kerja, di mana seseorang itu miskin karena menganggur, sehingga tidak memperoleh penghasilan atau kalau bekerja tidak penuh, baik dalam ukuran hari, minggu, bulan maupun tahun. (ii) upah gaji dibawah minimum, (iii) produktivitas kerja yang rendah, (iv) ketiadaan aset, (v) diskriminasi, (vi) tekanan harga, dan (vii) penjualan tanah.

METODE PENELITIAN / METHODS

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (survei) kepada penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba. Desain survei adalah mengunjungi sampel desa yang telah ditentukan di Kabupaten Bulukumba. Jumlah desa yang akan dikunjungi sebanyak 2 desa yang terdistribusi pada 2 kecamatan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam kepada responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh

informasi/data sesuai dengan objek yang akan diteliti. Lokasi yang dikunjungi adalah Desa Bontobaji di Kecamatan Kajang dan Desa Bontomacinna di Kecamatan Gantarang.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas dua yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari BPS, sementara data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dari penduduk miskin. Metode Penentuan sampel dilakukan secara acak (random sampling) dari sampel desa yang telah ditentukan. Metode penentuan sampel lokasi dilakukan secara bertingkat yaitu memilih 2 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba yakni Kecamatan Kajang dan Kecamatan Gantarang. Dalam satu kecamatan dipilih masing-masing 1 desa yakni Desa Bontobaji di Kecamatan Kajang dan Desa Bontomacinna di Kecamatan Gantarang. Penentuan kecamatan dan desa didasari atas pertimbangan bahwa sebagian besar angka kemiskinan berada didaerah tersebut. Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kajang masing-masing merupakan tiga daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Gantarang mencapai 6.009 jiwa sedangkan Kecamatan Kajang sebanyak 6.109 jiwa (Bulukumba Dalam Angka, 2015).

Sedangkan jika dilihat berdasarkan komoditi unggulan, maka komoditi yang masuk kategori tersebut adalah komoditi ubi kayu dan padi sawah. Produksi komoditi ubi kayu yang tertinggi terdapat di Kecamatan Kajang yakni 7.812 ton dengan tingkat produktivitas 149 kw/ha (Bulukumba Dalam Angka, 2015). Akan tetapi produktivitasnya relatif jauh lebih rendah dibandingkan Kecamatan Bulukumpa dan Bontobahari. Sedangkan untuk daerah penghasil ubi jalar tertinggi, terdapat di Kecamatan Gantarang dengan tingkat produktivitas 121 kw/ha. Menariknya, tingkat produktivitas produksi ubi kayu di daerah tersebut tergolong rendah, berada di bawah Kecamatan Ujungloe dan Kecamatan Rilauale. Untuk komoditi padi sawah, jumlah produksi dan tingkat produktivitas tertinggi pertama adalah Kecamatan Gantarang dengan jumlah produksi sebanyak 99.187 ton dan produktivitas sebesar 64 kw/ha dan merupakan yang tertinggi di Kabupaten Bulukumba.

Teknik pengumpulan data primer adalah teknik wawancara mendalam kepada responden melalui instrumen kuesioner/daftar pertanyaan semi terbuka. Data primer yang akan dikumpulkan antara lain; identitas responden, jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, kepemilikan aset/luas lahan produksi, sarana produksi, tantangan pengembangan komoditi terkait masalah produksi, aksesibilitas terhadap pasar, pemenuhan pangan, pemukiman, sandang, akses pendidikan dan kesehatan, aksesibilitas sosial terhadap kesempatan berbicara di forum serta akses informasi bantuan. Untuk memperkaya analisis, menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten

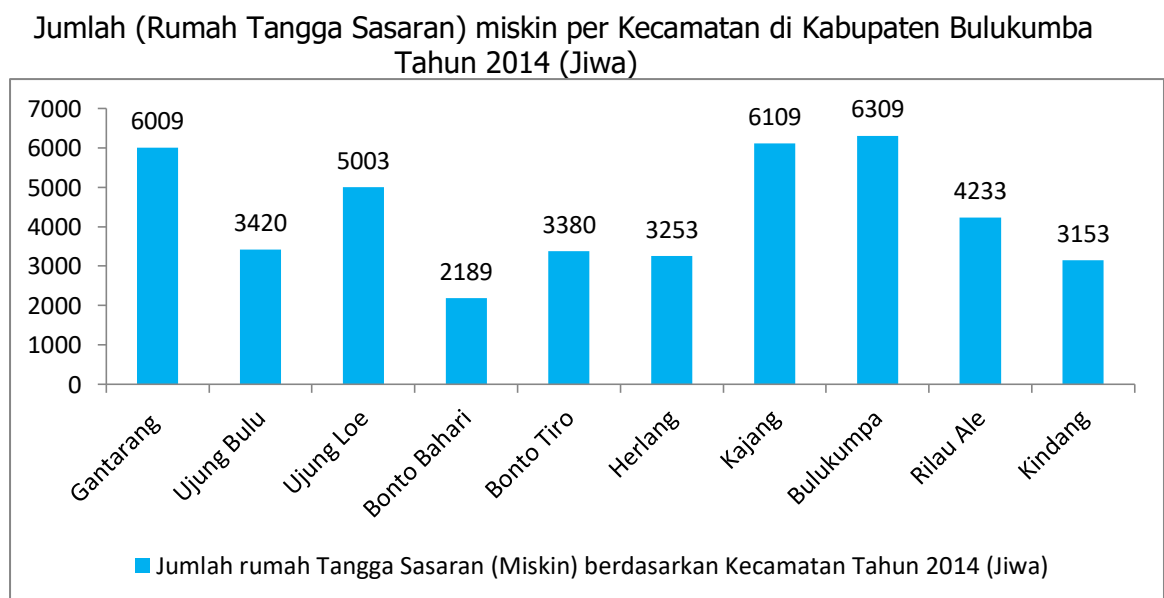
Bulukumba. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi penduduk miskin di lokasi survei dan kondisi komoditi unggulan padi sawah dan ubi kayu, sebagai alternatif pengembangan komoditi unggulan yang dapat berkontribusi dalam mengurangi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bulukumba. Hasil analisis deskriptif menghasilkan rekomendasi kebijakan, untuk pengembangan sektor unggulan terhadap usaha pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bulukumba.

HASIL DAN PEMBAHASAN / *DISCUSSION*

Kemiskinan

Mencermati tingkat kemiskinan di Kabupaten Bulukumba, nampaknya menggambarkan kondisi yang cukup dinamis. Meskipun tingkat kemiskinan sempat menurun di tahun 2014 menjadi 8,37 persen, namun jika dilihat dalam dua tahun sebelumnya tepatnya di tahun 2012, angka tersebut tidak cukup lebih baik karena di tahun 2012 angka kemiskinan pernah menyentuh level terendah yakni sebesar 7,83 persen. Dengan kata lain, jika dibandingkan antara periode tahun 2012 dengan 2014 maka kinerja pengentasan kemiskinan berjalan kurang impresif. Kondisi kemiskinan Kabupaten Bulukumba dilihat dari garis kemiskinan berdasarkan rupiah, tampak bahwa garis kemiskinan yang ada mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, standar kategori kemiskinan jika dilihat dari segi pendapatan terus meningkat, seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita. Seseorang dikatakan miskin jika berada di bawah garis kemiskinan tersebut, begitu pun sebaliknya jika seseorang mampu meningkatkan pendapatannya di atas garis kemiskinan tersebut maka dapat digolongkan sebagai tidak miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba di tahun 2005 ditetapkan sebesar Rp.108.700 dan meningkat menjadi Rp.249.131 di tahun 2013 lalu konsisten naik hingga ke tahun berikutnya sebesar Rp.260.236. Angka tersebut menjadi salah satu barometer mengukur tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Bulukumba, ditinjau dari aspek pendapatan. Standar garis kemiskinan tersebut, dapat menjadi target bagi pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk setidaknya mengangkat posisi pendapatan masyarakat secara umum, sehingga mampu keluar dari garis kemiskinan yang ada.

Kantong-kantong kemiskinan bertumbuh didaerah sentrum produksi pertanian yang tinggi. Jika dilihat berdasarkan geografis, tampaknya sebaran penduduk miskin Kabupaten Bulukumba terkonsentrasi di tiga kecamatan yakni pertama Kecamatan Bulukumpa sebanyak 6.309 orang disusul Kecamatan Kajang sebesar 6.109 orang dan terakhir Kecamatan Gantarang. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Kecamatan Bontobahari. Sebagai komparasi, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Kajang bertumbuh tiga kali lipat dari jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Bontobahari. Hal ini dapat menjadi benchmarking, begitu tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Kajang, begitupun juga dengan Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Gantarang.



Sumber: Bulukumba dalam angka, 2016.

Anomali yang terjadi, daerah tersebut adalah sentrum produksi pertanian yang ada di Kabupaten Bulukumba, sehingga hal ini cukup penting untuk menjadi perhatian pemerintah dalam menyusun dan mengontrol program pengentasan kemiskinan. Misalnya saja Kecamatan Gantarang adalah daerah yang paling besar berkontribusi produksi padi sawah Kabupaten Bulukumba, begitu pun juga dengan Kecamatan Kajang yang juga sangat besar kontribusinya menyumbang produksi ubi kayu, yang notabene adalah salah satu komoditi pertanian yang paling produktif Kabupaten Bulukumba. Kedua komoditi tersebut memiliki andil yang besar, dalam membentuk PDRB Kabupaten Bulukumba. Bilamana pemerintah mampu mengintensifkan program pengentasan kemiskinan dengan efektif di

ketiga wilayah tersebut, maka jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Bulukumba dapat berkurang secara massif, sehingga program pengentasan kemiskinan yang selama ini dikerjakan secara kolektif dari berbagai organisasi perangkat daerah setidaknya bisa berjalan lebih maju.

Aspek Sosial

Tingkat produktivitas seseorang, juga sangat ditentukan dengan derajat kesehatan. Dengan demikian, aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk dimasukkan, sebagai indikator pelayanan dasar untuk meminimalisir tingkat kemiskinan.

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan informan didominasi oleh tingkat pendidikan rendah yakni tidak tamat SD hingga tamat SD. Dengan kata lain, sebagian besar penduduk yang berpendidikan rendah bekerja sebagai petani. Padahal, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian juga sangat ditopang oleh sumber daya manusia yang baik. Jumlah infrastruktur sekolah dasar (SD) terbesar ada terdapat di Kecamatan Bulukumpa sebanyak 48 unit dengan jumlah murid 5.413 orang, disusul Kecamatan Gantarang sebanyak 46 unit dengan jumlah murid 7.328 orang dan terakhir Kecamatan Kajang sebanyak 45 unit sekolah, dengan jumlah murid 5.976 orang. Dengan kata lain, tingkat kebutuhan akan infrastruktur sekolah, jauh lebih di butuhkan di Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Kajang, sebab kedua daerah tersebut memiliki jumlah murid yang lebih banyak. Sementara rasio murid dan guru diantara Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Gantarang, masuk dalam kategori 4 daerah terendah di Bulukumba (Bulukumba dalam Angka, 2017).

2. Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan lebih tersentralisir di daerah perkotaan, dibandingkan dengan daerah kantong-kantong kemiskinan itu sendiri, yang notabene sangat membutuhkan pelayanan dasar kesehatan. Hal ini nampak, dimana jumlah tenaga kesehatan yang ada, lebih terkonsentrasi di Kecamatan Ujung Bulu yakni sebanyak 279 orang, disusul Kecamatan Gantarang sebanyak 83 orang dan terakhir adalah Kecamatan Bulukumpa dengan dukungan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 64 orang.

Tenaga kesehatan ini terdiri atas tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan dan tenaga kefarmasian serta tenaga kesehatan lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa minimnya tenaga kesehatan di pedesaan, utamanya untuk daerah kantong-

kantong kemiskinan akan semakin menurunkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi kelompok masyarakat miskin. Rendahnya pelayanan kesehatan tersebut, akan berdampak pada rendahnya kapabilitas sehingga masyarakat tersebut dapat menjadi rentan. Dengan demikian, pada konteks Kabupaten Bulukumba, distribusi tenaga kesehatan ke pelosok pedesaan menjadi masalah utama dibandingkan dengan distribusi fasilitas kesehatan. (Bulukumba dalam Angka, 2017).

Kondisi masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba, secara umum belum memiliki sanitasi. Sebagaimana yang terjadi di Dusun Balo-Balo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang ditemukan bahwa sekitar 85 persen responden tidak memiliki sanitasi. Beberapa diakibatkan karena faktor sosial budaya terkait keyakinan dan kepercayaan, misalnya meskipun Desa Bonto Baji tidak berada dalam kawasan Tana Toa yang menolak aspek modernitas dalam kehidupan sosialnya, termasuk sanitasi itu sendiri akan tetapi masyarakat di Desa Bonto Baji mendapat sedikit pengaruh dari daerah Tana Toa. Namun, itu sebagian kecil saja yang terjadi secara parsial dan kasuistik di Desa Bonto Baji. Kebanyakan responden buang hajat di kebun-kebun, tanpa mempertimbangkan lingkungan di sekitarnya. Perilaku buang hajat sembarang tempat, sangat rentan dengan berbagai macam penyakit. Minimnya infrastruktur dasar sanitasi ini, tentunya akan berpengaruh buruk bagi tingkat kesehatan masyarakat miskin, yang hidup dalam kondisi rentan.

Berbeda yang terjadi di Desa Bonto Macinna, kepemilikan sanitasi informan (petani padi sawah) telah terpenuhi secara maksimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki sanitasi lebih mendominasi sekitar 75 persen daripada responden yang belum memiliki sanitasi sebesar 25 persen. Bagi petani yang tidak memiliki sanitasi, ketika ingin membuang hajat maka biasanya membuang hajat di sungai terdekat. Walaupun, sebelumnya terdapat imbauan ke masyarakat yang belum memiliki sanitasi agar dapat melaporkannya di kantor desa. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat pasif dalam hal ini. Mereka akan menggunakan sanitasi, jika diberikan bantuan oleh pemerintah. Sedangkan mereka yang telah memiliki sanitasi, pada umumnya merupakan hasil bantuan dari lembaga donor non profit dari Jepang yakni JICA. Akan tetapi, kondisi tersebut lebih parah jika dibandingkan dengan Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang sebab masyarakat yang tidak memiliki sanitasi, mencapai hingga 85 persen.

Selain itu, terkait dengan sumber air minum bersih. Mayoritas masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba, telah memiliki sumber air minum yang memadai, walaupun jumlah masyarakat yang tidak memiliki sumber air minum juga masih banyak. Sebagaimana yang terjadi di Desa Bonto Macinna, dimana akses sumber air minum di daerah ini, sebagian besar

tidak memiliki sumber air minum. Selain itu, tantangan yang muncul adalah kesadaran warga yang masih rendah tentang pentingnya akses air minum yang bersih dan sehat.

Sementara, kemampuan untuk mengakses asupan nutrisi bagi masyarakat miskin juga sangat minim. Hal ini juga berkorelasi terhadap rendahnya tingkat pendapatan. Asupan nutrisi dan gizi, merupakan salah satu faktor penting untuk hidup sehat dan lebih produktif untuk bekerja.

3. Kesempatan berbicara dan Akses Informasi Bantuan dari Pemerintah

Persoalan utama kemiskinan diberbagai daerah adalah persoalan rendahnya aksesibilitas sosial. Kesempatan berbicara masyarakat miskin di Kabupaten Bulukumba sangat rendah, mereka sangat jarang menyampaikan pendapatnya dalam forum-forum tertentu. Kesempatan dan aksesibilitas sosial dan berbicara warga sangat rendah. Minimnya kesempatan berbicara warga, disebabkan karena mereka secara psikologis merasa malu untuk menyampaikan pendapatnya. Seperti yang terjadi di Desa Bonto Baji, Kec.Kajang, Kabupaten Bulukumba. Dimana, jumlah penduduk yang tidak memiliki kesempatan berbicara di forum tertentu, persentasenya sangat besar yakni 80 persen. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesempatan berbicara di forum tersebut. Akses informasi bantuan yang diperoleh oleh petani ubi kayu juga sangat rendah. Keterbatasan informasi ini disebabkan karena minimnya peran perangkat desa mendistribusikan informasi bantuan ke tingkatan bawah sehingga warga yang sangat membutuhkan informasi tersebut, menjadi sangat terbatas. Persentase responden yang mendapat informasi bantuan hanya sebesar 30 persen, sedangkan responden yang tidak memiliki informasi bantuan jauh lebih besar yakni sebesar 70 persen. Keterbatasan informasi ini disebabkan karena minimnya peran perangkat desa mendistribusikan informasi bantuan ke tingkatan bawah, sehingga warga yang sangat membutuhkan informasi tersebut, menjadi sangat terbatas.

Akan tetapi kondisi tersebut, jauh lebih memprihatinkan jika dibandingkan dengan Desa Bonto Macinna, Kec.Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Masyarakat yang tidak memiliki kesempatan berbicara di forum desa, mencapai hingga 95 persen. Termasuk akses informasi bantuan yang sampai kepada responden sangat terbatas, yakni sebesar 90 persen. Angka yang cukup mengkhawatirkan, di mana aksesibilitas informasi yang merupakan ujung tombak peningkatan kapabilitas seseorang untuk dapat diberdayakan secara maksimal, utamanya mereka yang tergolong miskin. Untuk sumber informasi

seharusnya sampai kepada masyarakat. Akses informasi bantuan yang selama ini sampai kepada masyarakat, muncul atas inisiatif kepala dusun yang terlibat aktif mendata dan menyampaikan berbagai kebutuhan masyarakat di kantor desa. Namun, hal ini masih bersifat personal, akan tetapi butuh penguatan kelompok agar informasi bantuan yang ada, dapat terakses secara massif dan lebih distributif.

Aspek Ekonomi

Petani yang menanam komoditi padi sawah dan ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, memiliki pendapatan yang lebih baik. Setidaknya, tingkat pendapatan yang diperoleh diatas angka garis kemiskinan perkapita per bulan, yang ditetapkan oleh BPS. Dengan kata lain, keberadaan komoditi unggulan padi sawah dan ubi kayu mampu meningkatkan petani di Kabupaten Bulukumba.

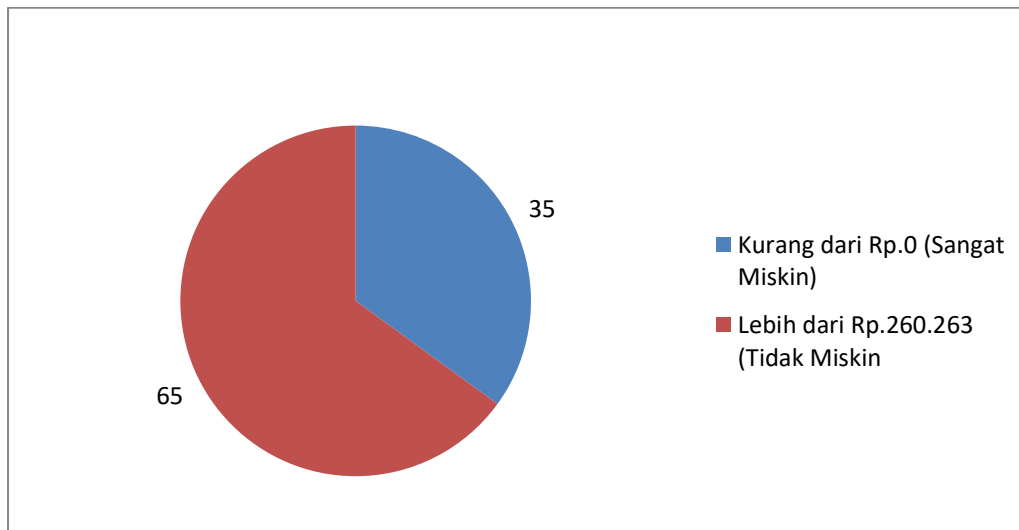
Luas panen, Produksi dan Tingkat Produktivitas Komoditas Padi Sawah dan Ubi Kayu di Lokasi Survey Kabupaten Bulukumba

Rincian	Padi Sawah	Ubi Kayu
Luas Lahan (Ha)	0,62	1
Total Produksi (Ton)	4,3	24
Tingkat Produktivitas (Ton/Ha)	7	23,5
Biaya Produksi Per Ha (Rp)	2.745.250	3.009.750
Harga Jual Per Kg (Rp)	4.300	582
Rata-Rata Pendapatan (Rp)	16.267.450	10.958.250

Sumber : Data Primer, hasil wawancara.

Rata-rata jumlah produksi komoditi ubi kayu cukup besar yakni 24 ton per hektar. Adapun rata-rata produktivitasnya mencapai 23,5 ton per hektar. Untuk memproduksi ubi kayu dengan jumlah tersebut, membutuhkan biaya produksi sekitar 3 juta rupiah per hektar. Harga jual komoditi ini di pasar lokal Kabupaten Bulukumba tergolong rendah, yakni hanya sebesar Rp.582 per kilogram. Biasanya hasil panen petani dijual dalam bentuk gelondongan ke pasar-pasar lokal. Dengan demikian, rata-rata pendapatan yang diperoleh petani adalah berkisar 10 juta rupiah per musim tanam.

Distribusi Informan Menurut Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan di Kab.Bulukumba (Persen)



Sumber: Data Primer diolah, 2017.

Jumlah hasil panen ubi kayu per musim tanam, pada intinya sangat besar. Namun, disebabkan harga jual yang rendah maka nilai yang diterima oleh petani belum cukup memuaskan petani.

Di Desa Bonto Baji, dari seluruh responden terlihat bahwa 80 persen petani ubi kayu menggarap lahannya sendiri. Dengan kata lain, lahan digarap adalah milik sendiri. Sebagian lainnya petani yang tidak memiliki lahan, bekerja sebagai petani penggarap. Persentase petani yang memiliki lahan sendiri mencapai 80 persen dan petani yang hanya bekerja sebagai petani penggarap mencapai 20 persen. Dengan kata lain, secara umum petani yang ada di Desa Bonto Baji memiliki kepemilikan aset lahan sendiri. Faktor lain yang juga mempengaruhi besar kecilnya jumlah produksi yang dihasilkan oleh petani ubi kayu adalah luas lahan garapan. Semakin luas lahan yang ditanami ubi kayu cenderung semakin banyak volume produksi yang dihasilkan.

Untuk komoditi padi sawah, rata-rata produksinya mencapai 4,3 ton per hektar, dengan tingkat produktivitas yang mencapai 7 ton per hektar. Biaya produksi yang dikeluarkan per musim panen adalah sebesar 2,7 juta rupiah. Komoditi ini dijual ke pedagang luar kota, seperti dari Kabupaten Sidrap dan pedagang Kabupaten Bone, yang biasanya datang ke lokasi panen. Dengan demikian, pendapatan yang diperoleh per musim tanam mencapai 16 juta rupiah bagi yang menggarap lahan sendiri. Untuk buruh tani atau petani penggarap, biasanya memperoleh hampir setengah dari pendapatan tersebut per musim tanam. Lahan ubi kayu ini, dapat dipanen satu kali dalam setahun yakni dengan

waktu 7 bulan. Sedangkan setelah masa panen ubi kayu lewat, dilanjutkan dengan menanam jagung yang memiliki masa panen 3-4 bulan.

Akan tetapi, ditinjau dari segi nilai ekonomi hasil dari ubi kayu dianggap lebih prospektif menciptakan peningkatan pendapatan dibandingkan dengan tanaman jagung. Hal tersebut diakibatkan karena tanaman ubi kayu tidak begitu rumit perawatannya dan biaya produksinya tidak begitu mahal. Namun, luas lahan garapan menjadi masalah utama bagi peningkatan pendapatan petani. Petani yang memiliki luas lahan yang sedikit, cenderung mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah daripada petani dengan lahan yang cukup luas. Berdasarkan hasil pengamatan yang ada di lapangan, tampaknya petani yang memiliki luas lahan garapan kurang dari 1 ha, adalah petani miskin. Sebaliknya petani yang memiliki luas lahan garapan minimum 1 ha adalah dipastikan tidak miskin, meskipun itu hanya bekerja sebagai petani penggarap. Petani yang memiliki luas lahan hingga 1 ha dapat menghasilkan 24 ton ubi kayu. Hal mendasar yang tidak bisa dihindari adalah lahan garapan yang sangat terbatas, disisi lain petani tidak berdaya secara aset.

Pengaruh luas lahan garapan memang sangat signifikan mengakumulasi tingkat pendapatan. Program reformasi agraria sangat dibutuhkan pada konteks ini. Ketika petani memiliki lahan yang memadai untuk bertani, maka mereka dapat merasakan dampak peningkatan hasil produksi ubi yang lebih banyak, sehingga tingkat pendapatannya pun akan semakin tinggi, serta secara perlahan akan berpindah kuadran ke petani berpendapatan menengah. Pemberian aset tanah, salah satu bentuk intervensi pemerintah yang sangat cepat menciptakan nilai akumulasi pendapatan dalam jangka waktu pendek. Untuk diketahui bersama, bahwa program pemberian aset tanah tidak hanya meningkatkan produksi petani, namun sekaligus mempersempit gap antara petani miskin dan orang kaya atau pemilik tanah. Untuk itu, kebutuhan yang sangat mendesak bagi petani adalah peningkatan kapabilitas terhadap kepemilikan aset tanah. Tanah adalah alat akumulasi kesejahteraan. Lebih dari itu, tanah juga merupakan ases sosial kapital yang memiliki aspek sosiologis bagi masyarakat, untuk beraktivitas dan hidup bahagia. Dengan demikian, tanah kebutuhan yang sangat esensial dan utama untuk menciptakan kesejahteraan, meminimalisir kemiskinan serta mempersempit gap ketimpangan ekonomi yang ada.

Tingkat pendapatan petani ubi kayu di Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, tingkat pendapatan petani ubi kayu secara umum sangat rendah dan tergolong miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan yakni berada pada angka Rp.260.236 untuk tahun 2014 (BPS Bulukumba, 2016). Tingkat pendapatan petani yang tergolong di bawah garis kemiskinan lebih dominan yakni

sebesar 55 persen. Sementara tingkat pendapatan petani yang berada di atas garis kemiskinan jauh lebih kecil yakni sebesar 45 persen. demikian dapat dikatakan bahwa petani ubi kayu yang ada di lokasi tersebut tergolong miskin.

Petani ubi kayu yang memiliki area garapan kurang dari 1 Ha dipastikan memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan. Sementara Petani yang memiliki areal garapan kurang dari 60 are maka tingkat pendapatannya kurang dari Rp.150.000 perbulan (miskin) dan petani yang memiliki areal garapan kurang dari 40 are maka tingkat pendapatannya kurang dari Rp.50.000 perbulan, bahkan minus untuk setiap bulannya (sangat miskin). Tampaknya, terbatasnya lahan pertanian yang dikelola oleh petani ubi kayu sangat berpengaruh pada peningkatan produksi petani, yang tentunya juga berdampak pada peningkatan pendapatan. Disaat yang sama beberapa petani, justru memiliki luas lahan 3 ha keatas. Dengan demikian, pada kondisi sosial ini terdapat dua hal penting yang terkonfirmasi dengan jelas bahwa tingkat kemiskinan di daerah ini tinggi dan disertai dengan ketimpangan tingkat pendapatan yang cukup lebar.

Secara keseluruhan, tingkat pendapatan petani padi sawah di Desa Bonto Macinna relatif lebih baik jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh petani dengan mata pencaharian ubi kayu. Hal ini ditandai oleh jumlah informan yang mempunyai pendapatan berada di atas garis kemiskinan lebih besar daripada petani yang berada di bawah garis kemiskinan. Rata-rata pendapatan petani padi sawah di Desa Bonto Macinna, Kecamatan Gantarang berada diatas garis kemiskinan Kabupaten Bulukumba, yakni diatas Rp.260.236 per bulan (BPS Bulukumba, 2016). Sebanyak 85 persen petani yang berpendapatan diatas garis kemiskinan dan hanya 15 persen petani yang berpendapatan rendah. Dengan demikian, tingkat pendapatan petani padi sawah secara umum cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah produksi padi yang dihasilkan. Petani yang memiliki luas lahan garapan 40 are ke atas, dipastikan tidak miskin.

Begitupun juga sebaliknya, jika luas lahan garapan petani di bawah 40 persen, maka hasil produksi yang dihasilkan rendah dengan tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan atau masuk dalam kategori miskin. Hal ini berlaku baik bagi petani yang menggarap lahan sawahnya secara mandiri maupun bagi petani penggarap. Pendapatan petani yang diperoleh untuk luas lahan garapan minimum 40 are adalah sebanyak 4,9 juta rupiah per musim panen atau setara dengan 1,6 juta rupiah per bulan, dengan jumlah produksi sekitar 2,7 ton padi kering dan nilai jual gabah sebesar Rp.4.300 per kg. Pada

umumnya, petani yang bekerja sebagai petani, berstatus sebagai petani penggarap. Pemilik lahan hanya mempercayakan ke petani untuk menggarap sawahnya dengan sistem bagi hasil. Kondisi faktual dilapangan juga memperlihatkan bahwa jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dari jumlah luas lahan garapan yang ada. Bahkan, kebanyakan petani ingin sekali bekerja dengan luas lahan yang lebih luas, namun lahan garapan tersebut sangat terbatas. Konsekuensinya, bagi mereka yang tidak memiliki lahan garapan, maka kebanyakan memilih menjadi TKI di Malaysia untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Untuk petani yang memiliki luas lahan garapan yang di bawah 40 are, memiliki jumlah produksi yang lebih sedikit, sehingga tingkat pendapatannya juga sangat rendah dan mereka tergolong sebagai penduduk miskin. Belum lagi, hasil produksi tersebut harus dibagi dua ke pemilik lahan. Selain itu, dalam proses produksi petani penggarap harus memodali terlebih dahulu biaya-biaya yang terkait produksi seperti; pupuk urea, pestisida, sewa traktor, dan tenaga kerja panen. Kondisi seperti ini, ini sangat membebankan petani. Dengan jumlah produksi yang sangat rendah, disaat yang sama mereka terbebani dengan biaya-biaya produksi yang mahal akibat prasyarat sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan. Di samping itu, mereka juga harus memenuhi kebutuhan penghidupan sehari-hari keluarga yang cukup beragam. Dampaknya, pendapatan bersih yang diperoleh sangat rendah atau dibawah Rp.260.236 per bulan, bahkan petani yang sangat miskin hanya bertani untuk memenuhi kebutuhan makannya saja tanpa menunggu pendapatan bersih per bulan.

KESIMPULAN / CONCLUSION

Berdasarkan hasil penulurusan lapangan dan data sekunder yang ada, maka gambaran kemiskinan Kabupaten Bulukumba, dapat dilihat dari dua aspek yakni aspek sosial dan aspek ekonomi. Dari aspek sosial menunjukkan bahwa kondisi petani miskin dalam kondisi serba terbatas, yang dibuktikan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tidak tersedianya fasilitas kesehatan dasar bagi warga miskin, seperti akses air minum bersih, akses sanitasi yang buruk, akses petani terhadap bantuan pemerintah dan akses petani untuk menyampaikan aspirasi di forum-forum penting. Beberapa bentuk kegiatan yang diusulkan adalah (i) memberikan akses untuk ikut terlibat dalam proses perencanaan agar kebutuhannya dapat diakomodir, (ii) memberikan bantuan, khususnya pada bantuan sanitasi yang layak, akses air minum yang sesuai standar hidup layak, dan peningkatan asupan gizi bagi petani miskin, (iii) inovasi kelembagaan dapat dilakukan dengan pembuatan UPTD

khusus pengentasan kemiskinan. Fungsi lembaga ini untuk menjawab masalah lemahnya koordinasi antar instansi dan tumpang tindihnya program pengentasan kemiskinan. Program inovasi kelembagaan ini terdiri atas unit pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi, serta adanya transparansi program berjalan yang ditampilkan di website khusus lembaga ini, sehingga aksesibilitas informasi bantuan kepada penduduk miskin lebih mudah dan transparan, (iv) melakukan redistribusi tenaga kesehatan dan pendidik yang terkonsentrasi di perkotaan, menuju ke Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa.

Dari aspek ekonomi menunjukkan bahwa petani yang menanam komoditi padi sawah dan ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, memiliki pendapatan yang lebih baik. Setidaknya, tingkat pendapatan yang diperoleh diatas angka garis kemiskinan perkapita per bulan, yang ditetapkan oleh BPS. Disisi lain, tingkat produktivitas tanaman ubi kayu bertumbuh dengan tingkat produktivitas tertinggi dalam satu dekade terakhir, dibandingkan komoditi padi sawah. Hal ini mengindikasikan bahwa komoditi ubi kayu merupakan tanaman yang produktif di daerah ini. Namun, peningkatan produktivitas sektor ini belum mampu mengentaskan tingkat kemiskinan yang ada di wilayah ini. Produksi ubi kayu dijual dengan bahan mentah tanpa olahan.

Permasalahan utama terkait dengan input produksi adalah luas lahan garapan dan distribusi pupuk yang terbatas dan tidak lancer, sehingga menghambat proses produksi yang ada. Selain itu, pada umumnya petani yang mengelola luas lahan kurang dari 40 Ha, dipastikan miskin. Begitupun juga dengan petani yang memiliki luas lahan garapan yang di bawah 40 are, juga dipastikan miskin. Tingkat ketimpangan pendapatan antara petani dengan pemilik lahan sangat timpang di seluruh wilayah, yang disebabkan oleh ketiadaan lahan garapan. Maka pemerintah Kabupaten Bulukumba, mesti mengakselerasi program reforma agraria, untuk pemberian lahan garapan pertanian bagi petani yang sangat membutuhkan. Dampaknya dapat berdimensi ganda yakni menekan angka kemiskinan dan mempersempit gap ketimpangan pendapatan, maupun ketimpangan sosial atau minimal dengan menyediakan lahan garapan hamparan untuk pengelolaan berbasis kelompok. Selain itu, peningkatan skala produksi juga dapat dilakukan dengan, pengembangan kapasitas (skill) petani, memperkuat kelompok-kelompok tani dan koperasi sebagai wadah gerakan ekonomi kolektif yang dapat memfasilitasi produk untuk pemasaran, memperkuat jaringan rantai pemasaran, membangun tempat sebagai sentra penampungan produk-produk olahan

atau usaha mikro dan kecil di lokasi-lokasi strategis, menyiapkan mekanisme resi gudang untuk komoditi pertanian sehingga hasil panen dapat terserap dan terjual dalam pasar, komoditi yang dihasilkan dapat memiliki nilai tukar yang lebih tinggi dan memiliki daya tahan terhadap fluktuasi harga yang terjadi. Selain itu, akses terhadap perbankan menjadi jauh lebih mudah bagi kelompok tani, sebab pihak perbankan juga sangat merespon sistem transaksi seperti ini, yang sekaligus juga dapat menjawab inklusifitas kemudahan akses keuangan bagi petani miskin.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES

- Amartya, Sen, 1999. *Development as Freedom*, Alfred Knopf, New York.
- Bernstein and B.K. Campbell (ed.), *Contradictions of Accumulation in Africa. Studies in Economy and State*, Beverley Hills: Sage.
- BPS.2017.Bululukumba Dalam Angka.Bulukumba
- BPS.2016.Bululukumba Dalam Angka.Bulukumba.
- BPS. 2015. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2014. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2013. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2012. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2011. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2010. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2009. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2008. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2007. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2016. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- BPS. 2005. Bululukumba Dalam Angka. Bulukumba.
- Deliarnov., 2010. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta:Rajawali Pers
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- Handayani, Prastiwi Tri. 2010. *Analisis Pengaruh Investasi, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Kabupaten/ Kota Provinsi DIY 2004- 2009*. Universitas Veteran : Yogyakarta.
- <https://indoprogress.com/2018/04/petani-dalam-lintasan-kapitalisme/>
- Macarov, David. 2003. *What the Market does to People : Privatization, Globalization, and Poverty*. London, Zed Books.,hlm. 52.

Papilaya. 2006. Diakses dari repository.ipb.ac.id/.../7/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf. Pada tanggal 20 Juli 2017, Pukul 14.00

Skousen, Mark., 2007. Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern. Jakarta:Prenada Media.

Stiglitz, Joseph. 2000. Globalization and its Discontent, Penguin Books, London.

Wood, E. M., (2002). The origin of capitalism: A longer view. London ; New York: Verso

